

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola negara terhadap kinerja ESG perusahaan, serta bagaimana sistem hukum memoderasi hubungan tata kelola negara terhadap kinerja ESG perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan publik terdaftar di negara yang mengadopsi energi terbarukan dengan periode pengamatan 2016-2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria perusahaan publik yang terdaftar di negara yang mengadopsi energi terbarukan, menggunakan sistem hukum *common law* atau *civil law*, melakukan praktik ESG, dan menyajikan data lengkap terkait dengan variabel penelitian. Sampel akhir yang digunakan berjumlah 2.733 perusahaan dengan 19.131 unit analisis. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan metode *Generalized Least Square* (GLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola negara berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja ESG perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa moderasi dari sistem hukum *common law* memperkuat hubungan negatif tata kelola negara terhadap kinerja ESG perusahaan. Perusahaan yang beroperasi di negara dengan tata kelola negara yang lemah menggunakan kinerja ESG yang lebih tinggi untuk mempertahankan legitimasi mereka, khususnya perusahaan yang beroperasi di negara *common law*. Temuan ini mengisi kesenjangan literatur dengan membuktikan bahwa sistem hukum yang berbeda memberikan tekanan yang berbeda pada pengaruh tata kelola negara terhadap kinerja ESG perusahaan. Hasil penelitian sekaligus memvalidasi berlakunya teori legitimasi pada motivasi eksternal perusahaan untuk meningkatkan kinerja ESG.

Kata Kunci: Kinerja ESG, Sistem Hukum, Tata Kelola Negara, Teori Legitimasi

ABSTRACT

This study investigates the influence of country-level governance on corporate ESG performance and how legal system moderates the relationship between country-level governance and corporate ESG performance. This study was conducted on public companies in countries that adopt renewable energy with an observation period of 2016-2022. The sampling technique uses purposive sampling with the following criteria of public companies registered in countries that adopt renewable energy, use common law or civil law legal systems, carry out ESG practices, and present complete data related to research variables. The final sample used was 2,733 companies with 19,131 observation units. The data analysis technique uses panel data regression with the Generalized Least Square (GLS) method. The results show that country-level governance has a significant negative effect on company ESG performance. The results also find that the moderation of the common law legal system strengthens the negative relationship between country-level governance on corporate ESG performance. Companies located in countries with weak country-level governance use higher ESG performance to maintain their legitimacy, especially companies located in common-law countries. These findings fill the literature gap by proving that different legal systems place different emphasis on the influence of country-level governance on corporate ESG performance. The results also validate the applicability of legitimacy theory to companies' external motivation to improve ESG performance.

Keywords: Country-Level Governance, ESG Performance, Legal System, Legitimacy Theory